

**TANAM PAKSA DI KERESIDENAN TEGAL: KAJIAN TENTANG SISTEM,
PELAKSANAAN DAN DAMPAKNYA (1830–1870)**

Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D

E-mail: tsetyaki34@gmail.com

Abstract

This article discusses the cultivation system applied in the Tegal Residency starting from the system, its implementation and the impact that arose on the community in that period. Cultivation system, which was implemented from 1830 to 1870, has become an important momentum for the socio-economic changes of the people in the Tegal Residency. The research problems to be dealt with here include an overview of the conditions Tegal Residency before the cultivation system, the implementation of cultivation system the residency, and the impact of cultivation system. The research method used is the historical method which consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. This study employs an economic sociology approach. The research results indicate that plantation activities already existed but have not developed well. The application of cultivation system encouraged plantations to expand by utilizing available resources, namely land and labor, both of which are closely related in traditional ties. Productivity levels increased for both sugar, coffee, indigo and tea plantations from before the implementation of cultivation system, although indigo and tea developed more slowly. This had an impact on society with the emergence of wage labor, population growth, benefits for colonial officials, and peasant resistance movements.

Keywords: *Cultivation System, Land, Labor, and Residency of Tegal*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tanam paksa yang diterapkan di Keresidenan Tegal mulai dari sistem, pelaksanaannya dan dampak yang timbul pada masyarakat di periode tersebut. Tanam paksa yang diterapkan mulai tahun 1830 hingga tahun 1870 telah menjadi momentum penting bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat di Keresidenan Tegal. Garis besar permasalahan yang di kaji dalam skripsi ini meliputi gambaran

umum Keresidenan Tegal sebelum tanam paksa, pelaksanaan tanam di Keresidenan Tegal, dan dampak tanam paksa di Keresidenan Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini merupakan pendekatan sosiologi ekonomi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa aktivitas perkebunan telah ada tetapi belum berkembang dengan baik. Penerapan tanam paksa mendorong perkebunan mengalami ekspansi dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yaitu tanah dan tenaga kerja yang keduanya terkait erat dalam ikatan tradisional. Tingkat produktivitas meningkat untuk komoditas perkebunan seperti gula, kopi, indigo dan teh dari sebelum penerapan tanam paksa, walaupun untuk indigo dan teh berkembang lebih lambat. Hal ini membawa dampak pada masyarakat dengan munculnya tenaga kerja upah, penambahan jumlah penduduk, keuntungan bagi para pejabat kolonial, dan gerakan perlawanan petani.

Kata Kunci: Keresidenan Tegal, Tanah, Tanam Paksa, dan Tenaga Kerja.

1. Pendahuluan

Jawa berada pada situasi ekonomi yang kurang baik setelah VOC dibubarkan. Agenda utama dalam usaha mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan produktivitas komoditas tanaman perkebunan. Secara tidak langsung semangat liberalisme yang melanda Eropa ikut serta dalam corak pengambilan keputusan di tanah jajahan Belanda. Hal ini tergambar pada pandangan Dirk Van Hogendorp dalam pembangunan ekonomi di Jawa dengan prinsip perdagangan bebas dan pemberian tanah kepada swasta secara terbuka, meskipun hal ini tidak pernah terjadi (D.H. Burger, 1983:2).

Usaha ini tidak berhenti, karena pada masa pemerintahan berikutnya tetapi memiliki corak liberalisasi. Pada masa Daendels terjadi penggalakan pembukaan perkebunan kopi pemerintah dan penjualan desa untuk pengembangan perkebunan tebu pada pemodal. Pada masa Raffles kebijakan pembayaran pajak dengan uang dilakukan dan para petani dibebaskan untuk menanam tanaman komoditas perkebunan. Meskipun demikian kebijakan Raffles ini tidak efektif dan besar produksi gula dan kopi sebagai komoditas perkebunan menurun dibandingkan pada masa Daendels (J.S. Furnivall, 2009:79). Menurut Creutzberg setelah dibubarkannya VOC hingga berakhirnya masa pemerintahan Raffles merupakan periode yang suram dari segala segi terutama

kegagalan dalam memulihkan perekonomian Jawa (Pieter Creutzberg dan J.T.M van Laanen, 1987:134).

Usulan Du Bus ditolak oleh Raja William dan menyepakati usulan Van Den Bosch yang berdasar monopoli negara atas komoditas ekspor perkebunan yang diharuskan ditanam oleh petani sebagai pengganti atas pajak yang harus mereka bayar. Penyebabnya secara sederhana dapat dikatakan karena menjanjikan usulan kedua menjanjikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Usulan inilah yang menjadi dasar dari sistem yang dikenal dengan *cultuurstelsel* kedepannya.

Cultuurstelsel jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya berarti “sistem pembudidayaan” yang mengacu pada aturan yang harus diterapkan pada petani sebagai pembudidayaan tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa dengan ketentuan yang tercantum dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* tahun 1834 No. 22. Historiografi nasional mengartikan *cultuurstelsel* berbeda, “sistem pembudidayaan” hanyalah bagian normatif yang jauh dari realisasi, karena itu yang lebih cocok untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada era itu digunakan nama sistem tanam paksa untuk menyebutnya (R.Z. Leirissa, dkk., 1996:53).

Komoditas yang dikembangkan untuk tanaman perkebunan ini beragam tergantung kecocokan kondisi wilayah, tetapi setidaknya tidak ada yang benar-benar baru yang didatangkan dari luar wilayah Hindia-Belanda. Salah satu wilayah di Jawa yang menjadi pusat perkebunan adalah Keresidenan Tegal. Upaya untuk menembangkan komoditas perkebunan negara telah ada sebelum sistem tanam paksa diterapkan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah ekspansi perkebunan untuk pertama kali tidak pernah sebesar ketika sistem tanam paksa diterapkan terutama untuk perkebunan tebu dan kopi.

Mulai tahun 1830 terjadi perubahan dengan cepat di Keresidenan Tegal, gula sebagai orientasi ekspor berkembang menjadi industri utama, sedangkan kopi menjadi komoditas kedua setelah gula dalam kuantitas produksi. Pada tahun 1831 terdapat perkebunan kopi dengan jumlah tanaman di Kabupaten Brebes 720.070 pohon, Kabupaten Tegal 223.466 pohon, dan Kabupaten Pemalang 659.442 pohon dengan produksi pada tahun 1832 sejumlah 8.769,67 *pikul*. Perkebunan tebu di Keresidenan Tegal pada tahun 1833 menempati lahan seluas 500 *bau* dengan hasil produksi 4.000 *pikul* gula dengan dua pabrik pengelola yang berada di Kabupaten Tegal (Pabrik

Pangkah) dan Kabupaten Pemalang (Pabrik Tjomal). Pada tahun 1868 luas lahan tercatat menjadi 2.950 *bau* dengan rincian Pabrik Bandjardawa 400 *bau*, Pabrik Tjomal 300 *bau*, Pabrik Pagongan 150 *bau*, Pabrik Adiwerna 400 *bau*, Pabrik Doekoewringin 400 *bau*, Pabrik Kemanglen 400 *bau*, Pabrik Pangkah 500 *bau*, Pabrik Djatibarang 400 *bau*, sedangkan pada tahun yang sama daerah yang menjadi tempat penanaman kopi berada di Distrik Gantoengan, Distrik Mandiradja, Distrik Bongas, Distrik Boemieajoe, Distrik Lebaksiu, dan Distrik Salem. Ekspansi dari perkebunan tebu dan kopi ketika sistem tanam paksa diterapkan telah membawa perubahan sosial ekonomi di Keresidenan Tegal yang tentunya menjadi masalah yang menarik jika dikaji.

Garis besar permasalahan yang dikaji dalam artikel ini meliputi gambaran umum Keresidenan Tegal sebelum tanam paksa, pelaksanaan tanam di Keresidenan Tegal, dan dampak tanam paksa di Keresidenan Tegal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan kondisi umum di Keresidenan Tegal sebelum masa tanam paksa; (2) Menjelaskan proses pelaksanaan tanam paksa di Keresidenan Tegal; (3) Mengkaji dampak penerapan sistem tanam paksa bagi kehidupan sosial-ekonomi di Keresidenan Tegal.

2. Metode Penelitian

Kajian ini tergolong dalam kajian sejarah. Sejarah sebagai ilmu membutuhkan metode. Menurut Garraghan, metode sejarah merupakan suatu kumpulan yang sistematis yang berasal dari prinsip-prinsip dan peraturan yang bermaksud membantu dengan efektif untuk pengumpulan sumber sejarah, pengujian sumber secara kritis, dan menyajikan sintesa dalam bentuk tertulis (Gilbert J. Garraghan dalam Wasino dan Endah Sri Hartatik, 2018 :11). Louis Gottschalk menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Louis Gottschalk, 1975:32). Pengertian metode sejarah dengan demikian dapat disederhanakan sebagai langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh kebenaran sejarah.

Penulisan kajian ini menggunakan metode sejarah yang dikemukakan oleh Louis Gottschalk. Rekonstruksi sejarah dapat dilalui dengan empat tahap, yaitu: (a) pengumpulan sumber (heuristik), (b) Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik (kritik sumber), (c) interpretasi, (d) menyusun menjadi sebuah kisah (historiografi) (Louis Gottschalk, 1975:18).

Heuristik adalah usaha mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Upaya yang dilakukan penulis dalam tahap heuristik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema. Dokumen adalah jejak pikiran dan perbuatan oleh orang-orang zaman dulu (Charles Seignobos dan Charles-Victor Langlois, 2019: 25). Hal ini dilakukan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi di abad ke-19 hanya meysisakan dokumen tertulis.

Pada dasarnya sifat dokumen ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu dokumen sezaman dikategorikan sebagai sumber primer dan dokumen yang telah lewat dari skup peristiwa dikategorikan sebagai sumber sekunder (Kuntowijoyo, 2018:75). Pada sumber primer dalam kajian ini meliputi arsip dan catatan sezaman yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan tanam paksa di Keresidenan Tegal. Tempat yang dituju penulis untuk mencari sumber primer yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia terutama koleksi Arsip Residensi Tegal. Penulis mendapat berhasil mendapat arsip seperti *Algemeen Verslag*, dan *Residentie Tegal Kultuur Verslag*. Sumber yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder disini berupa buku dan jurnal. Tempat yang akan dituju untuk menggali sumber sekunder yaitu, Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Jember.

Tahap kedua yaitu kritik sumber atau verifikasi sumber sejarah. kritik sumber dilakukan agar dapat memperoleh otentisitas dan kredibilitas dari sumber yang didapatkan. Terdapat dua macam kritik sumber yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengkritik sumber dari bentuk fisiknya untuk membuktikan keaslian sumber (autentik) sedangkan kritik internal dilakukan sengan mengkritik sumber dengan melihat isi substansinya untuk membuktikan bahwa sumber dapat dipercaya (kredibel) (Louis Gottschalk, 1975: 81,95)

Tahap ketiga yakni interpretasi yang merupakan upaya penafsiran dari sumber yang telah didapatkan setelah melalui kritik sumber. Pada tahap inilah proses analisis dari sumber sejarah dilakukan. Pada tahap ini juga peran dari pendekatan dan teori berguna sebagai alat analisis yang dapat menjabarkan suatu peristiwa sejarah.

Tahap yang terakhir yaitu historiografi. Pada tahap ini, dilakukan untuk penyusunan sumber-sumber yang telah melalui berbagai tahapan hingga diperoleh data yang valid (heuristik, kritik Sumber dan interpretasi), dan disusun menjadi sebuah tulisan. Historiografi bertujuan mengupayakan untuk menyajikan peristiwa sejarah yang

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Bentuk dari penulisan artikel ini adalah deskriptif analitis, sebagai bentuk penulisan yang berupaya memaparkan permasalahan yang menjadi topik kajian ini yang terbentuk dalam hubungan kausalitas yaitu 5W+1H (Sartono Kartodirdjo, 1993: 10).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keresidenan Tegal Sebelum Sistem Tanam Paksa

Keresidenan Tegal merupakan salah satu daerah Pasisir yang berbatasan dengan Keresidenan Chirebon di timur; Keresidenan Banyumas di selatan; Keresidenan Pekalongan di barat; dan Laut Jawa di utara. Pada daerah ini terdapat banyak rangkaian pegunungan yang berpuncak pada Gunung Slamet di selatan yang cocok untuk tanaman kopi (A. J. van der Aa, 1851:268). Daerah ini juga terdapat banyak sungai yang bersumber dari pegunungan tersebut yang digunakan untuk irigasi pertanian. Salah satu sungai yang terkenal adalah Sungai Tjomal (P.P Roorda van Eysinga, 185:3). Oleh karena hal ini Keresidenan Tegal menjadi daerah yang cocok bagi pengembangan komoditas Pertanian. Keresidenan Tegal telah menjadi daerah yang cukup penting sebagai penghubung Batavia dan Kerajaan Mataram Islam pada masa VOC. Pada perkembangannya Keresidenan Tegal juga menjadi salah satu wilayah yang dilalui jalan raya pos dan muncul juga jalan yang menghubungkan daerah ini dengan Keresidenan Banyumas. Hadirnya jalan ini membuat Keresidenan Tegal menjadi simpul bagian barat bagi perkembangan perekonomian di Pantai Utara Jawa Tengah (Endah Sri Hartatik, 2018:37).

Tegal awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Mataram. Tegal menempati posisi yang cukup penting yaitu sebagai tempat wedana bupati *Pasisir Kulon* mengawasi daerah *Pasisir* yang berada di barat kerajaan Mataram (B. Schrieke, 1957:205). Pada tahun 1824 daerah Oeloedjami yang awalnya merupakan bagian dari Keresidenan Pekalongan bergabung dengan Keresidenan Tegal yang berada di bawah administrasi daerah Kabupaten Pemalang, sekaligus menjadi batas paling barat yang baru (*Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1824, No.2*). Keadaan demografis Keresidenan Tegal sebelum sistem tanam paksa tidak begitu menunjukkan perkembangan yang berarti. Jumlah penduduk pada tahun 1802/3 berjumlah 203.628 jiwa (Van Niel dikutip oleh Gerrith Knaap dalam Peter Boomgaard, Dick Kooiman dan Henk Schulte Nordholt, 2008: 87) pada tahun 1815 berjumlah 178.415 jiwa (Thomas

Stamford Raffles, 1830: 287), pada tahun 1830 berjumlah 168.644 jiwa (TNI, 1839:162). Hal ini dapat diartikan sebagai tren negatif dari penambahan jumlah penduduk di wilayah ini, sebelum penerapan sistem tanam paksa.

Pada tahun 1832 Keresidenan Tegal secara administratif terbagi menjadi tiga Kabupaten, yakni Tegal, Brebes dan Pemalang. Pertama, Kabupaten Tegal dengan luas 460 *paal* persegi yang terdiri atas Distrik Tegal, Distrik Krandon, Distrik Maribaija, Distrik Kalie Sokka, Distrik Balamoa, dan Distrik Gantoengan. Kabupaten Tegal menjadi pusat pemerintahan Keresidenan, sedangkan pusat pemerintahan Kabupaten terdapat di Distrik Tegal Kedua,. Kabupaten Brebes dengan 956 *paal* persegi yang terdiri atas Distrik Brebes, Distrik Lebaksioe, dan Distrik Boemiajoe. Ketiga, Kabupaten Pemalang dengan luas 672 *paal* persegi yang terdiri atas Distrik Pemalang, Distrik Tjommal, Distrik Mandiradja, Distrik Bongas, dan Distrik Tjomal Kidol (ANRI: “Statistiek Tegal 1832”).

Keresidenan Tegal telah menjadi tempat berkembangnya tanaman perkebunan sebelum sistem tanam paksa, seperti indigo yang telah ada sejak zaman VOC yang dibudidayakan di daerah Pemalang (Taufiq Ismail, 2015:170). kopi yang telah ada sejak awal abad ke-18 yang digalakan di masa Daendels (*Staat Der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder Het Bestuur Van Den Gouverneur -Generaal Herman Willem Daendels, Ridder , Luitenant- Generaal In De Jaren 1808 – 1811, 1814*), dan tebu yang telah dibudidayakan oleh para orang China dan dijual untuk kebutuhan domestik (*Algemeen Verslag Wegen de Staat van Den Landbouw 1828*). Meskipun demikian, tentu tanaman ini dibudidayakan secara terbatas dan belum menjadi tanaman yang populer dikalangan petani.

3.2 Sistem Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal

3.2.1 Basis Produksi

Penerapan tanam paksa di Keresidenan ini mendorong perluasan perkebunan pemerintah di wilayah Keresidenan Tegal. Basis produksi dari penunjang keberlangsungan aktivitas perekonomian ini mengandalkan tanah dan tenaga kerja wajib yang di organisir menggunakan sistem tradisional. Sistem tanam paksa mendorong penguatan komunalisasi tanah-tanah sawah di wilayah ini, dengan demikian angkatan kerja yang terserap kedalam kerja wajib semakin banyak dan distribusi beban kerja semakin merata (*Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den*

Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10, 1857: 3). Seperti yang terjadi pada tahun 1844 pada Desa Bantarbolang yang membuka area sawah baru untuk menambahkan 1600 keluarga dari golongan yang tidak menggarap tanah yang asalnya terutama dari Distrik Bongas dan Distrik Mandiradja (S. Van Deventer, 1866:134). Penggarapan tanah komunal ini kadang-kadang melewati batas desa, dengan catatan terdapat tanah komunal yang benar-benar tidak dibutuhkan karena tanah yang tersedia lebih banyak daripada yang dibutuhkan petani. Tanah ini dapat digarap oleh para petani dari desa lainnya dengan catatan mampu melaksanakan kewajiban yang melekat didalamnya. Kegiatan ini dinamakan *mratjang* (*Eindresumé I, 1876: 83*) yang banyak ditemukan di Distrik Doekoewringin.

Para penggarap tanah harus memenuhi beban kerja wajib yang melekat padanya dengan catatan semakin berat atau semakin intens kerja wajib tersebut maka mereka akan mendapatkan jumlah tanah yang semakin luas. Pada waktu itu Menurut Suhartono kerja wajib dibedakan menjadi: pertama *kerigan* (*desadiensten*) untuk perbaikan jalan, pematang, jembatan dll, kedua gugur gunung untuk perbaikan infrastruktur desa akibat bencana alam, ketiga kerigaji (*heerendiensten*) kerja wajib untuk raja dan patuh dan keempat kerja wajib di perkebunan (*cultuurendiensten*) (Suhartono, 1991:41). Sedangkan menurut kebutuhannya kerja wajib dibedakan menjadi dua yaitu kerja wajib *ajeg* (setiap hari) dan sesuai kebutuhan. Tercatat pada tahun 1862 terdapat 8.900 keluarga penggarap tanah yang harus memenuhi *cultuurendiensten* dan 2.446 keluarga penggarap tanah yang harus memenuhi *hereendiensten* (Kensuke Miyamoto, 1992:16). Namun beban ini dapat dilimpahkan pada para tuna kisma yang dikenal dengan *orang mondok* yang secara ekonomi bergantung pada mereka.

3.2.2 Produksi Komoditas Perkebunan

3.2.2.1 Gula

Produksi komoditas perkebunan utama di Keresidenan Tegal adalah gula dan kopi. Mulai tahun 1830 terjadi perubahan dengan cepat di Keresidenan Tegal, gula sebagai orientasi ekspor berkembang menjadi industri utama (Thomas Lindblad, 2000:104). Pada tahun 1833 terdapat dua pabrik gula yaitu Pabrik Pangkah dan Pabrik Tjomal yang memiliki luas area penanaman tebu 707 *bahu* (ANRI: "Statistiek 1832"). Pada tahun 1844 terdapat 7 pabrik (Pabrik Tjomal, Pabrik Pangkah, Pabrik Doekoewringin, Pabrik Kemanglen, Pabrik Adiwerna, Pabrik Bandjardawa, Pabrik Djatibarang) yang berdiri

dengan total kontrak luas penanaman tebu seluas 3200 *bahu* dengan wilayah penanaman yang meliputi Distrik Krandon, Distrik Dukuhwringin, Distrik Pangka, Distrik Comal Lor, dan Distrik Comal Kidul (ANRI: “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”) yang berarti ekspansi penanaman tebu telah mencapai kenaikan sekitar 450% dari tahun 1833.

Memasuki dasawarsa ketiga penerapan tanam paksa muncul dua pabrik baru yaitu Lemahabang dan Pagongan. Pabrik Lemahabang memiliki lahan tanam seluas 140 *bahu* di Distrik Lossarie dan Pabrik Pagongan 150 *bahu* di Distrik Tegal. Kedua pabrik ini berdiri dengan menggantikan kontrak pabrik yang awalnya mengelola perkebunan tembakau. Pagongan yang beroperasi cukup lama sebagai pabrik pemerintah, sedangkan kontrak antara pemerintah dengan kontraktor Pabrik Lemahabang hanya bertahan sampai tahun 1855 setelah itu pabrik ini berstatus partikelir (*Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10, 1857: 3*).

Tabel 3.1 Produksi Gula tahun 1835-1865

Tahun	Luas Penanaman (<i>bahu</i>)	Gula (<i>pikul</i>)
1835	1100	7.307,62
1845	3200	104.000
1855	2700	92.921
1865	2950	145.940,3

Sumber: S. Van Deventer, *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java, tweede deel* (Zalt-Bommel, 1866), hlm.373., “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI, *Memorie Behoorende Bij Het Rekest van Suiker Contracten Op Java gerigt aan den Koning* (Batavia:Lange & Co, 1860), hlm. 69., J.Millard, *Suikerindustrie op Java* (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1869), hlm.186-188.

Hingga tahun 1865 produksi gula yang dihasilkan telah berkembang pesat jika dibandingkan daripada tahun 1835 seperti yang terlihat pada tabel. Walaupun produksi ini turun pada tahun 1855 yang disebabkan oleh iklim dan absennya Pabrik Pangkah dalam menyertorkan tebu kepada pemerintah hingga memasuki dasawarsa terakhir penerapan tanam paksa, tetapi kemudian terjadi lonjakan produksi yang besar, yang dapat diartikan sebagai perkembangan produksi ke arah yang lebih bagus. Keresidenan Tegal sebenarnya telah menjadi pengekspor gula sejak awal penerapan sistem tanam

paksa, seperti pada tahun 1831 yang mengirimnya ke Riau, Muntok dan Palembang (*Nedelandsch-Indisch Handelsblad No.8-15*, 1831: 2). Selanjutnya untuk ekspor gula pemerintah dikirimkan ke Rotterdam pada tahun 1849 dan Amsterdam pada tahun 1865 lewat kapal besar yang singgah di Pelabuhan Tegal dengan tujuan di Semarang atau Batavia terlebih dahulu (*De Maandbode voor Den Handel 1865*).

Kepala desa menjadi golongan yang memiliki pengaruh paling kuat di desa dan memegang peran sangat penting dalam penanaman tanaman wajib, karena harus memegang kendali mulai dari distribusi tanah dan pengerahan tenaga kerja (*Eindresumé II*, 1880:88-95). Pada kasus di Tegal pernah terjadi hukum cambuk di depan umum pada empat kepala desa dari bagian utara Kabupaten Tegal dan Desa Ujungrusi karena telah menjadi pembicara dalam demonstrasi pada tahun 1861 mengenai tuntutan kenaikan upah penanaman (*TNI*, 1861:164-170). Hal ini menunjukan vitalnya peran kepala desa sebagai penghubung antara kepentingan ekonomi perkebunan kolonial dan masyarakat pribumi, meskipun pada dasarnya kekuasaan mereka tuduk pada kekuatan supra desa.

3.2.2.2 Kopi

Pada tahun 1833 kopi di keresidenan ini masih dibudidayakan secara terbatas oleh masyarakat yang mendiami tempat yang cocok untuk penanaman kopi. Hasil panen pada tahun tersebut berkisar 12.000 *pikul* (S. Van Deventer, 1866: 637). Kopi ditanam di setiap kabupaten yang ada di Keresidenan Tegal tercatat di Kabupaten Tegal kopi ditanam di Distrik Gantoengan, di Kabupaten Pemalang kopi ditanam di Distrik Mandiradja dan Distrik Bongas, dan di Kabupaten Brebes kopi di tanam di Distrik Boemiajoe, Distrik Lebaksiu, dan Distrik Salem (ANRI:“Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”).

Berdasarkan jenis lahan setidaknya terdapat tiga jenis kopi yang dibudidayakan yaitu: pertama kebun kopi (*koffij tuin*) yaitu kopi yang ditanam di lahan perkebunan milik desa, kedua kopi hutan (*koffij bosch*) yaitu kopi yang ditanam di lahan hutan yang tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggal, dan ketiga kopi pager (*koffij pagger*) yaitu kopi yang ditanam di tepi jalan-jalan dan dilahan pekarangan milik warga desa sebagai tambahan penghasilan (Jan Breman,2014: 215). Selanjutnya lewat resolusi 3 Februari 1833 No. 1 pemerintah pusat mengumumkan bahwa seluruh kopi di Jawa menjadi pembayaran sewa tanah yang harus diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan (S. Van Deventer, 1866: 389). Hal ini juga yang menjadi pemicu

masifnya budidaya kopi pada masyarakat selain itu juga terdapat insentif dari kelebihan penyerahan kopi dan remunerasi atas perawatan dan pengakutan kopi.

Pada gilirannya penanaman kopi juga menguntungkan pejabat kolonial karena penyeteroran kopi yang dilakukan para petani ini mendapat potongan dari para pejabat daerah yang besarnya di tentukan oleh pemerintah kolonial. Pada waktu itu potongan ini berjumlah 4 persen yang diberikan pada jajaran birokrasi baik untuk pemerintah kolonial ataupun kepala pribumi. Setelah potongan ini terkumpul kemudian didistribusikan pada tiap pejabat daerah. Besarnya potongan ini sebanyak 0.5% untuk residen, bupati, kontrolir, wedana, mantri kopi, dan 2% untuk kepala desa (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Motif keutungan ini yang menjadi dasar untuk mempertahankan penanaman wajib kopi kedepannya.

Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada penanaman kopi menunjukkan perkembangan. Pada tahun 1835 terdapat 5.836 keluarga dengan rincian Kabupaten Pemalang 1.700 keluarga, Kabupaten Tegal 733 keluarga, dan Kabupaten Brebes 3.401 keluarga (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Pada tahun 1841 terdapat 7.044 keluarga dan pada tahun 1858 terdapat 8.172 keluarga atau berkembang sekitar 116% (ANRI: “Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en meet 1841” dan P.J. Veth, 1868: 230). Pada tahun 1868 terdapat 14.602 keluarga dengan rincian Kabupaten Pemalang 5.323 keluarga, Kabupaten Tegal 906 keluarga, dan Kabupaten Brebes 8.373 keluarga (ANRI: “Residentie Tegal Kultur Verslag 1868”). Berdasarkan jumlah tenaga kerja tahun 1868 dapat dilihat bahwa peningkatan telah begitu pesat terjadi jika dibandingkan pada tahun 1835, atau bahkan contohnya pada Kabupaten Brebes saja lebih besar dari jumlah keseluruhan tenaga kerja ditahun 1858. Lebih detail lagi maka dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Pemalang yang menjadi daerah dengan perluasan yang paling besar dengan angka 3 kali lipat, meskipun Kabupaten Brebes yang menjadi daerah dengan jumlah tenaga kerja terbesar dengan perbandingan antara tahun 1835 dengan 1868. Hal ini wajar karena memang dua kabupaten ini yang menjadi fokus pengembangan penanaman kopi di Keresidenan Tegal.

Produksi kopi selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut. Produksi kopi menunjukkan tren yang lebih positif jika dibandingkan dengan produksi gula di atas karena tidak ada penurunan dari tahun 1835 hingga tahun 1865.

Tabel 3.2 Produksi Kopi tahun 1835-1865

Tahun	Kopi (<i>pikul</i>)
1835	10.950,63
1845	21.862,65
1855	39.219,67
1865	55.545,60

Sumber: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI., Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI., P.J. Veth, *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie II*, (Amsterdam: P.N. Van Kampen. 1869), hlm. 230-240., “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868”, Arsip Residensi Tegal No. 18.5, ANRI.

Selain tebu dan kopi, sebenarnya di keresidenan ini juga terdapat penanaman indigo, teh, dan tembakau, tetapi tidak menunjukkan perkembangan sepesat kopi dan tebu. Tanaman indigo dibudidayakan dalam skala kecil di Distrik Losari, Salem, Brebes pada Kabupaten Brebes. Krandon, Maribaija, Balamoa, Gantungan, Kalisoka pada Kabupaten Tegal. Pemalang, Bongas, dan Mandiraja pada Kabupaten Pemalang (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Pada tahun 1832 produksi Indigo hanya sebesar 1.977 *pond* dan pada tahun 1841 produksi Indigo meningkat menjadi 26.399 *pond* (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Berdasarkan keputusan tanggal 7 Pebruari 1842 indigo hanya diproduksi secara terbatas, sehingga sejak tahun tersebut produksi ini hanya dibatasi 10.000-12.000 *pikul* pertahun (Alamsyah: 2004:119).

Budidaya teh berkembang lebih lambat dari pada indigo. Jumlah pohon teh yang terdapat hingga tahun 1837 sebanyak 28.800 pohon di Distrik Lebaksiu, 44.230 pohon di Distrik Gantungan, dan 15.065 di Distrik Mandiraja (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk merawat tanaman ini berjumlah 288 keluarga. Pada tahun 1841 produksi teh sebesar 40.860 *pond*. Pada tahun 1845 produksi teh sebesar 61.479 *pond* yang menunjukkan perkembangan lebih tinggi daripada tahun 1841 (ANRI: “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”). Berdasarkan laporan pemerintah tahun tersebut tanaman tembakau juga mulai dirintis, dengan mendatangkan beberapa ahli dari Belanda namun kondisi cuaca yang tidak

memungkinkan akhirnya penanaman tahun tersebut ditunda (ANRI: “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”).

3.3 Dampak Sistem Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal

Penerapan tanam paksa membuat perkebunan dan pabrik pengelolanya berkembang pesat di Keresidenan Tegal. Tentu saja dalam hal ini tenaga kerja memegang peran vital dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Akibat dari diterapkannya tanam paksa muncul tenaga kerja upah baik yang bekerja di pabrik ataupun di lapangan.

Para tenaga kerja yang terlibat dalam operasional pabrik mendapatkan upah untuk kinerjanya. Berdasarkan keputusan residen pada 30 Mei No. 26 pada 1862 menyatakan upah buruh harian yang diterima 20 sen untuk Pabrik Comal dan 25 sen untuk pabrik Banjardawa (ANRI: “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1862”). Upah ini memiliki nilai yang berbeda pada tiap pabriknya. Upah untuk perker lapangan sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Pada tahun 1853 terdapat tenaga kerja 7.153 keluarga dalam budidaya kopi dengan total upah yang diterima berjumlah 145.276 gulden dengan demikian rata-rata tiap rumah tangga menerima 20,3 gulden (*Bijlage Van Het Algemeen Verslag Der Uitkomsten Van Het Onderzoek Betreffende De Koffijcultuur Op Java*). Penanaman tebu sendiri pada tahun 1858 memiliki tenaga kerja yang berjumlah 11.450 keluarga dengan total upah yang diterima sebesar 283.565 gulden dengan demikian pembayaran rata-rata tiap rumah tangga sebesar 24,7 gulden (P.J. Veth, 1869: 485). Nilai ini jika dibandingkan dengan pajak tanah yang harusnya dibayar oleh petani penanam padi pada pemerintah pada tahun 1861 dengan nilai sebesar 476.609 gulden atau dengan rata-rata pajak tanah per rumah tangga yang hanya sebesar 11,125 gulden (P.J. Veth, 1869: 109-110, maka nilai yang diterima dari budidaya kopi dan tebu hampir dua kali lipatnya. Insentif yang lebih besar dari beban pajak ini menunjukkan bahwa semakin masifnya monetisasi pada tingkat desa.

Akibat lainnya selain yang telah disebutkan adalah penambahan jumlah penduduk. Penerapan tanam paksa ternyata membawa dampak pada penambahan jumlah penduduk di Keresidenan Tegal yang terbilang cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1830 terdapat 168.644 jiwa, pada tahun 1841 terdapat 248.050 jiwa, pada tahun 1850 terdapat 250.739 jiwa, pada tahun 1860 terdapat 427.779 jiwa, dan pada tahun 1871 terdapat 812.132 jiwa (*TNI*, 1839:162, ANRI: “Statistiek Opgaven

der Residentie Tegal van en met 1836 tot en meet 1841”, ANRI: “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”, *Koloniaal Verslag 1860*, dan *Koloniaal Verslag 1871*). Berdasarkan angka tersebut jika dihitung dari tahun 1830 hingga tahun 1871 maka terdapat kenaikan penduduk sebesar 481.5% atau hampir menyentuh angka lima kali lipat, jumlah ini lebih besar jika dibandingkan kenaikan jumlah penduduk di Pekalongan atau Jawa secara keseluruhan yang hanya kisaran dua kali lipat dengan mengambil pada kurun waktu yang sama. (*TNI*, 1839:162, JC. Breman, 1971:34, dan *Koloniaal Verslag 1871*)

Keuntungan bagi para birokrasi kolonial juga patut disorot karena adanya *cultuur procenten* dan sejumlah hal lainnya seperti pemberian kembali hak pewarisan jabatan berdasarkan keturunan dan pemulihan tanah jabatan (Heather Sutherland, 1983:41). Dampak terakhir yang perlu disebutkan di keresidenan ini yaitu munculnya gerakan perlawanan petani pada tahun 1864. Perlawanan ini didalangi oleh Singo Troeno yang merupakan petani penanam tebu (*planter*) yang berasal dari desa Kedjambong Demangong. Dia juga di kenal dengan nama Mas Tjilik atau Raden Hadji. Singo Troeno dan pengikutnya memulai pemberontakannya pada 28 Oktober 1864 dengan sasaran utama orang-orang Eropa dan para birokrasi pribumi yang setia pada pemerintah kolonial. Singo Troeno memperoleh dukungan dari petani dengan janji akan membebaskan mereka dari kewajiban menanam tebu dan segala kerja wajib dalam sistem tanam paksa (*cultuurdienten* dan *hereendiensten*) yang menjadi beban berat bagi para petani (*Nieuwe Amsterdamsche Courant*, 1864: 3).

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya tentang Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan Dan Dampaknya (1830-1870) dapat disimpulkan bahwa Komoditas pertanian di Keresidenan Tegal sebelumnya telah terdapat berbagai tanaman perkebunan seperti Indigo yang telah ditanam sejak masa VOC, Kopi yang telah muncul pada tahun 1806, dan gula yang telah diperdagangkan oleh orang-orang Cina, tetapi tentu saja perkembangan komoditas ini lambat dan ekspansinya tidak seperti ketika sistem tanam paksa diterapkan. Penerapan tanam paksa mendorong peningkatan komoditas perkebunan terutama untuk gula dan kopi oleh para pengusaha. Basis produksi dari kegiatan ini bertumpu pada dua hal yaitu tanah dan tenaga kerja

yang keduanya di sediakan oleh pemerintah dengan kesepakatan kontrak dengan pengusaha.

Perkembangan tanaman perkebunan ini ikut berdampak pada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan didalamnya, seperti berkembangnya tenaga kerja upahan yang mengakibatkan monetisasi pada para petani. Hal yang paling mencolok pada periode ini adalah penambahan penduduk yang dapat dikatakan pesat akibat dari usaha petani dalam memenuhi tuntutan kerja untuknya. Selain itu hal ini juga di dorong fakta masa damai karena tidak ada perang dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan usaha vaksinasi yang semakin gencar untuk meredakan epidemie. Jika dihitung dari tahun 1830 hingga tahun 1871 maka terdapat kenaikan penduduk sebesar 481.5% di Keresidenan Tegal. Para pejabat Eropa maupun pribumi juga turut mengambil keuntungan dari hal ini, dengan sistem *cultuur procenten* atau persentase keuntungan penyeteroran berbagai produk tanaman perkebunan. Sering kali hasil keuntungan ini justru lebih besar daripada gaji yang mereka terima. Tanam paksa di keresidenan ini juga telah menyebabkan munculnya pemberontakan petani.

Daftar Sumber

1. Sumber Arsip

“Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI.

“Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”. Arsip Residensi Tegal No. 12.8. ANRI.

“Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”. Arsip Residensi Tegal No. 13.1, ANRI.

“Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”. Arsip Residensi Tegal No. 12/15. ANRI.

“Residentie Tegal Kultuur Verslag 1862”. Arsip Residensi Tegal No. 15/15. ANRI.

“Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868”. Arsip Residensi Tegal No. 18.5. ANRI.

“Statistiek der Residentie Tegal 1836”. Arsip Residensi Tegal No. 133. ANRI.

“Statistiek Opgaven der Residentie Tegal van en met 1836 tot en met 1841”, Arsip Residensi Tegal No. 210/1. ANRI.

“Statistiek Tegal 1832”. Arsip Residensi Tegal No. 211.5. ANRI.

2. Sumber Buku, Terbitan Tercetak, dan Tesis

Alamsyah. "Perkembangan Perkebunan Dan Pelabuhan Di Karesidenan Tegal (1830-1870)". *Tesis* pada Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2004.

Algemeen Verslag Wegen de Staat van Den Landbouw 1828.

Bijlage Van Het Algemeen Verslag Der Uitkomsten Van Het Onderzoek Betreffende De Koffijcultuur Op Java.

Boomgaard, Peter, Dick Kooiman, dan Henk Schulte Nordholt (Editor). *Linking Destinies: Trade, Towns And Kin In Asian History.* Leiden: KILTV, 2008.

Breman, Jan. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.

Breman, JC. *Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis.* Jakarta: Bhatara, 1971.

Burger, D.H. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983.

Creutzberg, Pieter dan J.T.M van Laanen. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia.* Jakarta:Yayasan Obor, 1987.

De Maandbode voor Den Handel 1865

Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2. Eerste Gedeelte. Batavia: ERNST & CO, 1876.

Eindresumé van het bij Goeverment Besluit dd. 10 Juni 1867 No.2. Tweede Gedeelte. Batavia: ERNST & CO, 1880.

Eysinga, P.P Roorda van. *Handbukk der Landen. En Volkenkunde. Geschied. Taal. Aardrijks-Te Staatkunde van Netherlandsch Indie.* Amasterdam: L. Van Bakkenes, 1850.

Furnivall, J.S. *Hindia Belanda Studi Ekonomi Tentang Majemuk.* Jakarta: Freedom Institute, 2009.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah.* Penerjemah Nugroho Notosusanto. (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.

Hartatik, Endah Sri. *Dua Abad Jalan Pantura: Sejak Era Kerajaan Mataram Islam hingga Orde Baru.* Yogyakarta: Nurmahera, 2018.

Tanam Paksa di Keresidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830–1870)

(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)

Ismail, Taufiq, dll. *Ensiklopedi Tokoh Pekalongan*. Pekalongan: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2015.

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Koloniaal Verslag 1860

Kolonial Verslag 1871

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.

Leirissa, R.Z. dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.

Lindblad, J. Thomas (Ed). *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 2000.

Memorie Behoorende Bij Het Rekest van Suiker Contracten Op Java gerigt aan den Koning. Batavia:Lange & Co, 1860.

Millard, J. *Suikerindustrie op Java*. 'S Gravehage: Martinus Nijhoff, 1869.

Overzicht Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomendee bij de Monographien der Reidentie Tegal dalam Stukken Betreffende Het Onderzoek Bij Besluit van den Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853. no 10. Batavia: Benomde Commisie (Commisie Umbgrove). 1857

Raffles, Thomas Stamford. *The History Of Jawa. Vol. II*. London: Jhon Murray, 1830.

Seignobos, Charles dan Charles-Victor Langlois. *Introduction To The Study of Histori: Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerjemah H. Suprianto Abdullah. (Temanggung:Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Staat Der Nederlandsche Oostindische Bezittingen Onder Het Bestuur Van Den Gouverneur -Generaal Herman Willem Daendels. Ridder . Luitenant-Generaal In De Jaren 1808 – 1811”. 's Gravenhage.

Suhartono. *Apanage dan Bekel: Peubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Sutherland, Heather. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta:Sinar Harapan, 1983.

Van der Aa, A. J. *Nedelandsch Oost-Indie: Beschrijving der Nedeerlandsche Bezittingen in Oost-Indie*. Amsterdam. J. F. schleijer, 1851.

Van Deventer, S. *Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java. II-III.* Zalt-Bommel, 1866.

Veth, P.J. *Aardrijkskundig En Statistisch Woordenboek Van Netherland Indie II.* (Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1869.

Wasino dan Endah Sri Hartatik. *Metode Penelitian Sejarah Dari Riset Hingga Penulisan.* Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2018.

3. Sumber Jurnal dan Koran

Miyamoto, Kensuke. "Subordinate Peasant in Mid-19th Century Java" dalam *Economic Journal of Hokkaido University.* Vol. 21, 1992.

Nieuwe Amsterdamsche Courant. No.1029. Rabu 28 Desember 1864.

Nedelandsch-Indisch Handelsblad. No.8. Minggu 15 Mei 1831.

*Nedelandsch-Indisch Handelsblad .*No. 15. Rabu 31 Agustus 1831.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, tweede deel. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1861.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, eerste deel. Batavia: Ter Lands- Drukkerij, 1839.